

TANTANGAN PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2018 MENUJU PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS

Siska Fitri Anggraheni
Universitas Sebelas Maret Surakarta
siskafitria@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Partisipasi masyarakat di Kabupaten Sukoharjo cenderung menurun khususnya dalam pemilihan kepala daerah. Pada tahun 2008 partisipasi masyarakat sebesar (61.80%); tahun 2013 (61.52%) dan pada tahun 2018 (61.31%). Salah satunya di Kelurahan Sugihan dimana jumlah masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 28.8%. Masih dibawah target pemerintah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 77.5%. Realitas tersebut mengidentifikasi terjadinya apatisme dikalangan pemilih mengingat pilkada langsung merupakan indikator pengembalian hak-hak dasar masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab eskalasi peningkatan golput sehingga dapat diberikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan triangulasi yang terdiri dari 4 tahap yaitu : 1) pengumpulan data; 2) reduksi data; 3) penyajian data dan 4) penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecenderungan masyarakat di Kelurahan Sugihan tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan *golput pragmatis*. Kesimpulannya perilaku politik pemilih berkaitan dengan stimulus dan pertimbangan subjektif dalam merespon faktor stimulus yang diperoleh.

Kata kunci : *partisipasi politik, pilkada 2018, pemerintahan demokratis*

ABSTRACT

Community participation in Sukoharjo Regency tends to decrease, especially in regional head elections. In 2008 community participation was (61.80%); in 2013 (61.52%) and in 2018 (61.31%). One of them is in Sugihan Sub-District where the number of people who do not use their voting rights is 28.8%. Still below the government target set out in the National Medium Term Development Plan (RPJMN) of 77.5%. This reality identifies the occurrence of apathy among voters, considering that direct election is an indicator of the return of basic rights of the people in the regions by providing full authority. The purpose of this study is to find out the causes of escalation in increasing abstentions so that solutions can be given to overcome these problems. This study uses a qualitative method. The technique of collecting data uses observation and interviews. The data analysis technique uses triangulation which consists of 4 stages, namely: 1) data collection; 2) data reduction; 3) presentation of data and 4) conclusion. The results showed that the tendency of the people in Sugihan Village not to use their voting rights was due to pragmatic abstentions. The conclusion of voter political behavior is related to stimulus and subjective considerations in responding to stimulus factors obtained.

Keyword: *political participation, local elections 2018, democratic government*

Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019

"Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Menurut Robert Dahl (1989) demokrasi memberikan kesempatan untuk 1) partisipasi secara efektif; 2) setara dalam hak suara; 3) mencapai pemahaman yang baik; 4) menjalankan kontrol akhir terhadap agenda dan 5) melibatkan orang dewasa [1]. Salah satu syarat penting dalam demokrasi adalah adanya partisipasi politik yang merupakan barometer penting untuk mengukur tahap kematangan demokrasi. Barnes dan Kaase (1979) membagi partisipasi politik dalam dua bentuk yakni 1) partisipasi konvensional meliputi melakukan pemilihan dalam pemilihan umum, terlibat diskusi politik, mempunyai hubungan dengan pemimpin dan prihatin terhadap isu-isu politik dan 2) partisipasi konvensional meliputi aktivitas vandalisme dalam rangka memperbaiki keadaan politik, mengajukan petisi, demonstrasi dan memboikot [2]. Dalam studi Verba, Nie dan Kim (1978) mengembangkan konsep partisipasi politik yang menekankan partisipasi konvensional khususnya pemilihan umum [3]. Pemilihan dalam pemilihan umum merupakan salah satu indikator yang penting untuk melihat partisipasi politik warga karena ia merupakan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh setiap warga masyarakat, sehingga terciptanya suatu masyarakat madani (civil society) yaitu masyarakat secara bersama-sama memecahkan masalah, bertindak sebagai saluran opini dan tekanan rakyat kepada pemerintah serta sarana perlindungan rakyat dari penguasaan pemerintah (Beetham & Boyle, 1995) [4].

Partisipasi yang terkait dengan pemilihan calon dalam pemilihan umum kerap diistilahkan sebagai perilaku memilih. Ada tiga aliran mengenai perilaku memilih yaitu 1) aliran sosiologikal yang menyatakan perilaku memilih dipengaruhi oleh karakter sosial dan kelompok sosial seperti agama, ekonomi dan demografis (Lazarsfeld, 1968) [5] 2) aliran psikososial atau identifikasi partai, yang didefinisikan oleh Pomper (1960) sebagai individu yang mengidentifikasi diri dengan partai sehingga mempengaruhi perilaku dan sikap mereka [6] dan 3) pendekatan rasional, oleh Downs (1957) didefinisikan sebagai logika berfikir

yang menekankan pada kepuasan finansial [7]. Tetapi ada sebuah pandangan yang berseberangan dengan aliran perilaku memilih dimana aspek struktur kelas, sosioekonomi, identifikasi partai tidak menjadi pertimbangan memilih dalam menentukan keputusannya yaitu golput. Golput merupakan suatu fenomena politik dalam negara demokrasi dimana individu tidak terdedah kepada rangsangan politik dan tidak melibatkan diri dalam berbagai kegiatan politik. Ada tiga faktor utama yang menyebabkan tingginya golput 1) kurangnya sosialisasi pemilu; 2) masyarakat lebih peduli dengan kebutuhan ekonomi dan 3) sikap apatis terhadap pemilu (Sukrisyanto, 2018) [8]. Realitas demokrasi lokal dewasa ini menitikberatkan pada partisipasi memilih, kualitas dan kuantitas memilih merupakan variabel penting dalam menghasilkan pemimpin yang berkualitas sebagai hasil dari demokratisasi [9].

Sejak era reformasi empat pemilu nasional terakhir dan pelaksanaan pemilu pada diberbagai daerah menunjukkan indikasi partisipasi memilih yang cenderung menurun. Pada Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah di Kabupaten Sukoharjo misalnya.

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pilgub Tahun 2008-2018 di Kab.Sukoharjo

No.	Pemilu Tahun	Tingkat Partisipasi Pemilih
1.	2008	61.80%
2.	2013	61.52%
3.	2018	61.31%

Sumber : KPUD Jateng 2018 [10]

Angka tersebut masih dibawah target pemerintah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menetapkan target kehadiran pemilih di TPS sebesar 77.5% [11]. Di Kelurahan Sugihan khususnya pada saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (PILGUB) tahun 2018 dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) 3.399 orang yang terdaftar dalam 10 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang menggunakan hak pilihnya sebesar 2.421 orang yang artinya jumlah pemilih yang tidak menggunakan

Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

hak pilihnya sebanyak 978 pemilih (28.8%) (PPS Sugihan, 2018) [12]. Realitas tersebut mengidentifikasikan bahwa telah terjadi apatisme di kalangan pemilih, perilaku tidak memilih (golput) yang menunjukkan eskalasi peningkatan dapat berimplikasi bagi perkembangan demokrasi yang berkualitas dikarenakan golput memiliki tujuan untuk mendeligitmasi pemilihan umum yang diselenggarakan pemerintah.

Kajian perilaku pemilih di Indonesia termasuk studi yang pada umumnya masih jarang dilakukan, dikarenakan pandangan miring para ilmuwan tentang pemilihan umum di Indonesia yang tidak dijalankan secara bebas dan adil terutama pada masa Orde Baru. Jika ada, hanya berkaitan dengan hasil dan penjelasan spekulatif tentang komposisi hasil perolehan suara (Asfar, 2002) [13]. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai salah satu bahan evaluasi dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat khususnya di Sugihan mengingat pemilu kepala daerah secara langsung merupakan indikator pengembalian hak-hak dasar masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen politik lokal yang demokratis.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Sugihan, Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengambilan informan menggunakan *purposive sampling technique area* meliputi ketua panitia pemungutan suara Sugihan dan masyarakat. Jumlah masyarakat dalam penelitian ini adalah 25 masyarakat yang terdiri dari 15 perempuan dan 10 laki-laki yang tersebar dalam 5 TPS yaitu TPS 001 Sugihan, TPS 003 Ngemplak, TPS 005 Siring, TPS 006 Siring dan TPS 008 Dalangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dan observasi. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik triangulasi yang terdiri dari 4 tahap, yaitu 1) pengumpulan data, 2) reduksi data, 3) penyajian data, dan 4) penarikan kesimpulan.

HASIL

Partisipasi politik sebuah negara dapat diukur dengan kegiatan yang dilakukan oleh warga negara untuk mempengaruhi tindakan dan keputusan

pemerintah (Zamhasari, 2017)[14]. Partisipasi politik ini salah satunya dapat diukur dengan kegiatan memberikan suara (*votting*) dalam pemilihan umum yang merupakan tanggungjawab yang perlu dilakukan oleh setiap warga masyarakat. Kecenderungan warga untuk turut serta dalam pemilihan umum merupakan wujud kesadaran politik dan nilai demokratik (Verba, Nie & Kim, 1978) [3]. Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 di Kelurahan Sugihan Kabupaten Sukoharjo prosentase pemilih yang tidak memilih (golput) sebesar 28.8% masih dibawah target pemerintah dalam RPJMN sebesar 22.5% dengan rincian perolehan di setiap tempat pemungutan sebagai berikut:

Tabel 2. Tingkat Prosentase Tidak Memilih
Dalam Pilgub Tahun 2018 di Kelurahan
Sugihan

TP S	Alamat	Prosentase Tidak Memilih
001	Sugihan	30.6%
002	Ngowan	21.5%
003	Ngemplak	35.9%
004	Siring	21.5%
005	Siring	33.6%
006	Siring	31.4%
007	Cendono	22.5%
008	Dalangan	33.3%
009	Puntuk	21.2%
010	Sugihan	26.1%

Sumber : Data Olahan 2019

Tabel di atas menunjukkan prosentase tidak memilih di setiap tempat pemungutan suara di Kelurahan Sugihan dengan jumlah terbanyak di TPS 005 Siring sebesar 33.6% dengan jumlah rata-rata yang tidak memberikan hak suaranya sebanyak 28.8%.

Ketua Pemungutan Suara Sugihan menyebutkan "Partisipasi masyarakat di Kelurahan Sugihan cenderung menurun hal ini dikarenakan kurangnya kepedulian masyarakat akan pentingnya pemilu serta pendidikan politik yang tidak menasar masyarakat, pendidikan politik yang dilakukan hanya mengenai tatacara pencoblosan surat suara serta faktor pendidikan, pekerjaan, sosialekonomi masyarakat juga mempengaruhi karena belum semua masyarakat melek politik."

Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

(Wawancara, 12 April 2019). Tindakan masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya ini termasuk dalam bentuk partisipasi politik yang didefinisikan oleh Ramlan Subakti sebagai suatu aktivitas masyarakat dalam memberikan keputusan untuk memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum (Budiarjo, 2010) [15]. Golput adalah sekelompok orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam suatu pemilu (Sy, 2010) [16]. Mufti Mubarak (Efriza, 2012) berpandangan bawa golput bertujuan untuk mendelegitimasi pemilu yang diselenggarakan pemerintah sehingga golput disebut juga sebagai barometer kualitas demokrasi [17].

Meskipun tidak menggunakan hak pilihnya, *non voters* terdiri dari kelompok orang dengan motivasi dan kondisi yang berbeda-beda. Nyarwi Ahmad (2009) menghimpun sejumlah jenis golput yang ada di Indonesia yakni golput teknis, golput pemilih hantu, golput ideologis, golput pragmatis dan golput politis [18].

Golput Teknis

Golput teknis adalah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih karena alasan teknis. Wawancara dengan ketua pemungutan suara Sugihan menyebutkan pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya karena alasan teknis dikarenakan sedang merantau dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) serta tidak mengetahui ketentuan penyelenggaraan pemilu. Hal ini dibenarkan masyarakat "Saya sudah 17 tahun tetapi tidak mendapatkan surat undangan untuk mencoblos jadi saya tidak ke tempat pemungutan suara." (Wawancara, 13 April 2019). Masyarakat lain berinisial SG menambahkan "Saya pindahan dan tidak tahu tatacara pencoblosan jika masih terdaftar di tempat asal". Kondisi ini mengindikasikan sosialisasi pemilu yang rendah dikarenakan menurut UU No. 10 Tahun 2016 disebutkan beberapa kategori pemilih salah satunya adalah daftar pemilih khusus yang merupakan warga setempat yang mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya pukul 12.00 – 13.00 dengan membawa e-KTP. Permasalahan teknis yang menyebabkan warga negara yang telah memenuhi syarat kehilangan hak pilihnya merupakan suatu pelanggaran terhadap hak

warga negara yang sudah dijamin dalam Pasal 28 E Ayat 3 yang menyebutkan "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Salah satu bentuk kebebasan mengeluarkan pendapat tersebut adalah mendapatkan hak pilih dalam pemilu. (Kadir, 2013) [19].

Golput Pemilih Hantu

Pemilih hantu mengacu pada nama-nama yang ada dalam Daftar Pemilih Tetap namun setelah dicek ternyata tidak memenuhi syarat sebagai pemilih karena berbagai alasan. "Sudah dilakukan pencocokan dan penelitian data sebelum pemilihan umum berlangsung melalui *door to door* terutama yang sudah meninggal, pemilih yang terdaftar ganda atau sudah pindah memilih dan tidak ditemukan alamatnya namun tetap ada kemungkinan *human error*, saya juga sering mendapatkan pengaduan dari petugas cokolit bahwa sebenarnya sudah ada perbaikan data pemilih namun ketika dilakukan perbaikan DPT pemilu masih sama saja belum ada perubahan. Tetapi data seperti ini tidak banyak jumlahnya, tidak sampai 10%" (Wawancara, 12 April 2019). Hal ini dibenarkan masyarakat S yang menyatakan "Saya sudah pindah tempat tinggal namun disini juga masih mendapatkan surat undangan sehingga saya terdaftar dalam 2 TPS" (Wawancara, 15 April 2019). Oleh karenanya sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI, 2017) seyogyanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) harus lebih aktif memantau kinerja penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajaran dibawahnya [20].

Golput Ideologis

Golput ideologis adalah pemilih yang tidak mencoblos karena tidak percaya pada sistem ketatanegaraan yang tengah berlaku. Ketua PPS Sugihan berpandangan bahwa "warga yang tidak hadir di tempat pemungutan suara (TPS) karena alasan tidak percaya pada sistem ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia saat ini dirasa tidak ada dikarenakan demokrasi pancasila secara normatif sudah menjamin setiap kepentingan masyarakat namun secara prosedural belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, jadi

Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

permasalahan ketidakpuasan masyarakat ada pada pelaksanaannya dimana aspirasi masyarakat kurang tersalurkan karena masalah teknis dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pemilihan umum” (Wawancara, 12 April 2019). Latar belakang pendidikan, sosial budaya dan psikologis pemilih merupakan faktor yang mempengaruhi golput ideologis (Aina, 2013) [21]. Hal ini sejalan dengan temuan (Atsari, A., David, E., & Bambang, E. C. W, 2017) yang menyatakan tingkat pendidikan masyarakat mempengaruhi kedewasaan politik masyarakat dalam menyalurkan aspirasi politiknya [22]. Masyarakat Sugihan yang mayoritas berpendidikan rendah dan bermata pencaharian sebagai petani menjadi penyebab tidak adanya informan yang termasuk dalam kelompok golput ideologis.

Golput Pragmatis

Golput pragmatis adalah mereka yang tidak ikut mencoblos karena menganggap Pemilu tidak memberi keuntungan langsung bagi pemilih. Golput jenis ini menilai bahwa mencoblos ataupun tidak mencoblos diri mereka tidak akan merasakan pengaruh apa-apa. “Memilih atau tidak memilih saya juga akan tetap bekerja sebagai petani lebih baik saya ke sawah saja.” (Wawancara, 15 April 2019). Pernyataan ini diperkuat dengan pendapat Susan Welch (Efriza, 2012) [17] yang menyatakan bahwa ketidakhadiran seseorang dalam pemilu berkaitan dengan kalkulasi untung rugi, apabila seseorang merasa lebih beruntung secara finansial dengan tidak hadir dalam pemilu tentu ia akan melakukan pekerjaan lain yang lebih menguntungkan. Masyarakat tidak tahu untuk apa pemilu itu diadakan, untuk apa mereka memilih serta kaitakan pilihan dan kepentingan masyarakat. “Menggunakan hak pilih merupakan suatu bentuk kesukarelaan jadi bebas digunakan atau tidak” (Wawancara, 15 April 2019). “Masyarakat yang tidak aksesibel terhadap informasi pemilu dikarenakan mayoritas warga bermata pencaharian petani serta kurangnya pendidikan politik.” (Wawancara, 12 April 2019). “Saya tidak mendapatkan imbalan uang atau sembako dari pasangan calon untuk apa saya memilih.” (Wawancara, 12 April 2019). Pemilu dianggap tidak membawa perubahan bagi kehidupan

masyarakat bagi dari segi ekonomi maupun sosial budaya.

Golput Politis

Golput politis adalah orang-orang yang percaya pada negara dan Pemilu namun kelompok ini tidak mau mencoblos karena merasa kandidat dalam pemilu tidak mampu mewartakan kepentingan serta preferensi politik mereka. “Apalagi dengan maraknya berbagai *hoax* di tengah masyarakat di zaman kemudahan informasi dan teknologi membuat masyarakat mudah terprovokasi dan dimobilisasi.” (Wawancara PPS Sugihan, 12 April 2019). “Sistem akhirnya hanya mengerucutkan pada dua kandidat yang keduanya sama-sama terlibat dalam kasus korupsi.” (Wawancara, 17 April 2019). Fenomena tersebut diperkuat dengan pendapat Arbi Sanit (1997) yang menilai bahwa golput adalah gerakan protes politik yang didasarkan pada problem kebangsaan [23]. Stigma politik kotor, jahat, menghalalkan segala cara memperburuk kepercayaan masyarakat kepada pemilu [24]. Kajian Norris dan Franklin ditemukan relevansi dengan kondisi real pemilih di Kelurahan Sugihan yaitu menurunnya tingkat partisipasi pemilih berkaitan dengan turunnya tingkat kepuasan terhadap *performance* pemerintah [25].

17 dari 25 informan di Kelurahan Sugihan termasuk dalam golput pragmatis yang artinya masyarakat belum teredukasi atas implikasi dari pemilihan umum terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pahmi Sy (2010) menjelaskan implikasi golput sebagai berikut: 1) Lemahnya legitimasi pemilu; 2) Munculnya sikap apatisisme masyarakat; 3) Melemahnya kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu; dan 4) Antipati masyarakat terhadap pemilu [16]. Sedangkan 6 dari 25 informan selanjutnya termasuk ke dalam golput teknis yang disebabkan oleh kendala teknis terkait tata kelola penyelenggaraan pemilu. Selanjutnya 1 dari 25 informan merupakan golput pemilih hantu yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. 1 dari 25 informan merupakan golput pragmatis yang tidak puas dengan pilihan kandidat yang diusung oleh partai politik. Terakhir dari 25 informan yang diteliti tidak ditemukan pemilih yang termasuk dalam golput politis. Hasil

Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

penelitian ini sama dengan penelitian Rahmad Rinjani (2014) di Kutai Kartanegara dimana *non-voters* didominasi oleh kelompok golput pragmatis [26]

Eskalsi peningkatan golput di Sugihan sejalan dengan temuan Cornelis Lay (2012) yang menyatakan survey dan jejak pendapat menunjukkan ketidakpuasan tinggi terhadap angka yang dihasilkan dalam pemilihan umum eksekutif lokal (gubernur, bupati, walikota) sehingga pemerintahan demokratis yang efektif masih jauh dari terwujud di tingkat lokal [27]. Maka latar belakang pemilih datang ke tempat pemungutan suara merupakan hal mendasar untuk diketahui sehingga dapat tercipta suatu pemerintahan yang demokratis yang tidak hanya mengejar kuantitas pemilih tetapi juga kualitas dari pemilihnya. Semakin besar suara rakyat dalam menentukan kebijakan, semakin besar pula kemungkinan kebijakan itu mencerminkan aspirasi mereka (Haryanto, 2014) [28] sehingga kegagalan pelaksanaan otonomi daerah dapat diminimalisir (Rusnaini, 2016) [29]. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk mengantisipasi demokratisasi yang hanya prosedural tetapi juga substantif (Yuliandari, 2007) [30]. Argumen kewajiban pemberian suara (seperti di Australia) mengandung arti bahwa memilih suatu pemerintahan dan memilih wakil-wakil rakyat merupakan tugas/kewajiban sekaligus hak warga negara. Suara abstain harus benar-benar ditulis dalam laporan hasil pemilu, dan bukan sekedar dinyatakan tidak hadir (Power & Robert, 1995) [31]. Hal ini dikarenakan partisipasi merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan demokrasi.

Di Indonesia pemberian suara dilihat sebagai suatu kesukarelaan. Maka perlu pembangunan budaya politik masyarakat melalui pendidikan politik sehingga partisipasi politik warga negara menjadi tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh setiap warga masyarakat. (Patrick, 1999) [32] mengemukakan bahwa pendidikan politik digunakan untuk menyiapkan warganegara yang demokratis. "Pendidikan politik perlu dilakukan kepada masyarakat tidak hanya sosialisasi tatacara pencoblosan sehingga kesadaran masyarakat menggunakan hak pilihnya dapat terbentuk." (Wawancara PPS, 12 April 2019). Hal

tersebut sejalan dengan penelitian Ayok Ariyanto (Ayok Ariyanto, 2016) yang menyatakan urgenitas pendidikan politik di era pilkada langsung sebagai pembinaan warga negara untuk menciptakan sistem politik yang demokratis, stabil, dinamis, efektif dan efisien [33]. Pendidikan selain berperan mewariskan budaya dan tradisi suatu negara juga dapat memainkan peran dalam melakukan evaluasi kritis terhadap budaya itu.

Miriam Budiardjo (2008) mengemukakan indikator sistem politik demokrasi diantaranya adalah pendidikan kewarganegaraan bahwa pengetahuan, keterampilan dan perilaku warga negara tidak muncul secara alamiah tetapi harus diajarkan secara sadar kepada setiap generasi [15]. Pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) mempunyai peranan penting untuk mempersiapkan warganegara untuk mendukung dan mengembangkan sistem politik yang demokratis (Risladiba, Dieta A L & Ricky E M, 2017) [34]. Pendekatan PPKn sebagai pendidikan ideologi Pancasila terintegrasi dengan pendidikan politik Pancasila (Muchtar, 2018) [35]. Struktur keilmuan pendidikan kewarganegaraan yang ditekankan disini adalah komponen keterampilan (*civic skills*) khususnya keterampilan partisipatif warganegara yang berwawasan luas, efektif dan bertanggungjawab dalam proses politik dan dalam masyarakat sipil seperti keterampilan berinteraksi, memantau, dan mempengaruhi (Winataputra, 2002) [36]. Warga negara yang terdidik dan memiliki informasi akan mengurangi jurang pemisah antara elite politik dan masyarakat sehingga terciptanya pemerintahan yang demokratis [37].

Penyelenggaraan pilkada juga harus memperkuat independensi dan netralitas sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karenanya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) harus lebih aktif memantau kinerja penyelenggara. Sehingga pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap benar-benar memberikan hak pilih kepada warga negara yang memenuhi syarat sehingga tidak ada warga negara yang kehilangan hak pilihnya karena masalah teknis dan tidak ada daftar pemilih hantu. Penyelenggara pemilu dan DKPP harus mengedukasi masyarakat secara

Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019
"Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan
Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

aktif untuk memanfaatkan mekanisme complain yang ada, sehingga menumbuhkan kesadaran public terhadap potensi pelanggaran dan kecurangan dalam pilkada.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa prosentase tidak memilih di Kelurahan Sugihan tinggi sebesar 28.8% di mana sebagian besar *non-voters* termasuk dalam kelompok golput pragmatis dibuktikan dengan dari 25 informan 17 diantaranya adalah kelompok golput pragmatis artinya masyarakat menganggap Pemilu tidak memberi keuntungan langsung bagi pemilih. Latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, dan demografis diduga menjadi faktor yang menyebabkan sikap antipati masyarakat terhadap politik. Dengan demikian dapat dikatakan, anggapan yang menyatakan pemilihan secara langsung belum menuai hasil demokrasi yang berarti karena pemilih masih tergolong pemilih emosional semata. Apriori demikian, mengetahui makna motivasi pemilih menentukan pilihanya dapat diusulkan solusi kepada pemerintah untuk melakukan pendidikan politik tidak hanya sosialisasi politik saja serta mendesak agen pendidikan politik lainnya seperti partai politik untuk dapat melaksanakan fungsinya dalam pendidikan politik secara massif meskipun bukan waktu pemilihan umum. *Kedua* penguatan Pendidikan Kewarganegaraan untuk mempersiapkan warganegara untuk mendukung dan mengembangkan sistem politik yang demokratis agar terciptanya masyarakat madani. *Ketiga non-voters* termasuk kedalam kelompok golput teknis sehingga perlu pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh penyelenggara pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) harus lebih aktif dalam memantau kinerja penyelenggara pemilu sehingga potensi pelanggaran dan kecurangan dalam pilkada dalam diminimalisir serta memastikan memastikan setiap warga negara mendapatkan hak pilihnya sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 E Ayat 3.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dahl, R. Democracy and Its Critics. New Haven London: Yale University Press, 1989
- [2] Barnes, S. H., & Kaase, M. Political action: mass participation in five Western democracies, Beverly Hills : CA Sage, 1979
- [3] Verba, S., Nie, N.H & Kim, J.O. "Participation and political equality", Canadian Journal of Political Science, 13 (1), 1978, pp. 218-219
- [4] Beetham, D., & Boyle, K. Introducing Democracy: 80 Questions and Answers. United Nations: Scientific and Cultural Organization (UNESCO). 1995
- [5] Lazarsfeld, P.F., Berelson, B., & Gaudet, H. "The People's Choice: How the Voter Makes Up His Mind in a Presidential Campaign", The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 261(1), 1968, pp. 194-194
- [6] Pomper, M.G. "The impact of the American voter on political science", Political Science Quarterly, 93 (4), 1978, pp. 617-628
- [7] Down, A. An economic theory democracy. New York: Harper & Row, 1957
- [8] Sukristyanto, A. "Governor Election and Political Participation in East Java" Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 19, 2018, pp. 552-559
- [9] Jan, W.V.D. 2016. Studying Political Participation: Towards A Theory Of Everything?. Proceedings of Political Science and International Comparative Social Research, (pp. 1-19).
- [10] KPUD Jateng. 2018. Perolehan Suara Pilgub 2008-2018 Per-Kabupaten diakses dari <https://jateng.kpu.go.id/download/perolehan-suara-pilgub-jateng-2008-2018/> pada 13 Mei 2019
- [11] Bappenas. 2014. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 diakses dari https://www.bappenas.go.id/files/6514/6225/7153/Buku_I_RPJMN_SDALH pada 16 April 2019 pukul 18.30

Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019
 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan
 Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

- [12]Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Plus Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Desa Sugihan, Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo diperoleh dari Panitia Pemungutan Suara Sugihan pada 16 Maret 2019 pukul 18.45
- [13]Asfar, M. 2006. Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004. Surabaya: Pustaka Eureka
- [14]Zamhasari. 2017. Building Beginner Voter's Interest in Political Participation in Indonesia's Election. Proceedings of International Conference on Democracy, Accountability and Governance (pp. 54-57). ICODAG
- [15]Budiardjo, M. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.2008
- [16]Sy, P. Politik Pencitraan. Jakarta: Gaung Persada Press. 2010
- [17]Efriza. Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik. Bandung: Alfabeta. 2012
- [18]Ahmad, N. "Golput Pasca Orde Baru: Merekonstruksi Ulang Dua Persepektif" Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 12(3), 2009, pp. 281-305
- [19]Kadir, A. "Peranan Partai Politik dalam Menanggulangi Golongan Putih (Golput) pada Pemilihan Legislatif 2019" Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, 1(1), 2013, pp. 54-64
- [20]Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). 2017. Persoalan Sebelum, Selama, Sesudah Penyelenggaraan Pilkada. Bandung: Biro Kerja Sama, Hukum dan Humas LIPI
- [21]Aina. "Perilaku Non-Voting Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang Periode 2008-2013" Jurnal Humanus, 12(1), 2013, pp. 53-68
- [22]Atsari, A., David, E., & Bambang, E.C.W. 2017. Political Volunteerism : Electoral Process of Independent Candidates in Jogja Independent (JOINT). Proceedings of Thrid International Conference on Social and Political Sciences (pp. 194-197). ICSPS
- [23]Sanit, A. Partai, Pemilu dan Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 1997
- [24]Mustadin. "Analisis Potensi Golput Pada Pemilu 2014 di Kota Yogyakarta" Jurnal Psikologi Integratif. 1(1), 2013, pp. 175-186
- [25]Norris, P., & Franklin, M."Social Representation". Eorupen Journal of Political Research. 32(2), 2003, pp. 273-282
- [26]Rinjani, R. "Studi Tentang Golongan Putih (Golput) Dalam Pilkada Gubernur Kaltim 2013 di Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara" Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2(4), 2014, pp. 3469-3481
- [27]Lay, C. "Democratic Transition in Local Indonesia: An Overview of Ten Years Democracy" Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 15(3), 2012, pp. 207-219
- [28]Haryanto."Kebangkitan Pasrty ID: Analisis Perilaku Memilih dalam Politik Lokal di Indonesia" Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 17(3), 2014, pp. 291-308
- [29]Rusnaini. 2016. Democracy and Local Autonomy Policy in Indonesia: A Particularist Perspective. Proceedings of 1st UPI International Conference on Sociology Education. (pp. 364-368). UPI ICSE
- [30]Yuliandari, E."Pembangunan Partisipasi Politik Dalam Pilkada: Menuju Pemerintahan Yang Demokratis" Jurnal PKn Progresif: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Kewarganegaraan, 2(1), 2007, pp. 72-87
- [31]Power, J.T., Robert, J., & Timmos. "Compulsory Voting Invalid Ballots and Abstention in Brazil." Political Research Quanterly, 48(4), 1995, pp. 795-826
- [32]Bahmuller, C.F., & Patrick, J.J. 1999. Principles and Practices of Education for democratic Citizenship. Proceedings of International Perspective and Project, Blangminton, Indian University, Educational Resources Information Centre , (pp. 210-231). ERIC
- [33]Ariyanto, A. 2016. Urgensi Pendidikan Politik di Era Pilkada Langsung.

Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019
"Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan
Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

Prosiding Seminar Nasional 2016
Evaluasi Pilkada Serentak: Membangun
Kesadaran Politik dan Komunikasi
Partisipatoris Menuju Penguatan Tata
Kelola Pemerintahan. (pp. 1090-1100)

- [34]Risladiba. Dieta, A.L., & Ricky E.M.
2016. Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila
Melalui Pembelajaran PKn Untuk
Mewujudkan Good and Smart Citizen.
Prosiding Seminar Nasional dan Call for
Papers Aktualisasi Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan untuk
Memperkuat Sendi-Sendi Kehidupan
(pp. 56-70). AP3KnI
- [35]Muchtar, A.S. 2018. Pembelajaran Nilai
Kebangsaan Dalam Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan di Indonesia.
Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai
Kebangsaan Melalui Pendidikan
Kewarganegaraan Persekolahan dan
Kemasyarakatan. (pp. 3-15).
- [36]Winataputra, U. *Materi dan
Pembelajaran PKN*. Jakarta: Pusat
Penerbitan Universitas Terbuka. 2002
- [37]Suyatno. "Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) dan Tantangan Demokrasi
Lokal di Indonesia" Jurnal Politik
Indonesia : Indonesian Political Science
Review, 1(2). 2016, pp. 212-230

